

POLITIK ALIENASI BIROKRASI

Dedi Zulkarnain Pratama*

Abstract

This paper discusses about political process of alienation by bureaucrat in Central Lombok region. Political policy of alienation is conducted by government in purpose to punish several bureaucrats that politically oppose in local election. Alienation policy is political punishment towards bureaucrats in purpose to cut off surely their career. If it is not, the bureaucrat will be non-job. Because of that, the political policy of alienation is very frightening for local bureaucrats who dissent with head of local government.

Key word: *bureaucracy, alienation policy, local government*

Abstrak

Makalah ini mendiskusikan proses politik alienasi kaum birokrat di Kab Lombok Tengah. Kebijakan politik alienasi dilakukan pemerintah dalam kerangka menghukum sejumlah birokrat yang tidak mendukung atau bersebrangan politik dalam pilkada. Kebijakan alienasi merupakan hukuman politik kepada kaum birokrat dalam usaha memastikan matinya karir seseorang. Kalau tidak mati, kaum birokrat tersebut dinon-jobkan. Karena itu kebijakan politik alienasi tersebut sangat menakutkan bagi birokrat daerah untuk berbeda pendapat dengan kepala daerah.

Kata kunci; birokrasi, kebijakan alienasi, pemerintah lokal.

* Staf Bank Mandiri KPC Renteng Praya

Pengantar

Walaupun Marx percaya bahwa ada hubungan inheren antara kerja dan sifat dasar manusia, tetapi dia juga berpendapat kalau hubungan ini telah diselewengkan oleh kapitalisme. Dia menyebut hubungan yang diselewengkan ini dengan alienasi.

(D. Cooper & Meisenhelder, 1991)¹⁰²

Tulisan ini akan berbicara tentang alienasi pengucilan birokrat dalam pengelolaan politik yang dilakukan oleh kepala daerah. Kebijakan politik alienasi ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, persamaan dan partisipasi. Dikatakan demikian, karena tiga prinsip tersebut sangat menghormati hak-hak sipil, sementara kebijakan politik alienasi cenderung sangat otoriter dan tidak memberikan ruang untuk berbeda pendapat. Praktek politik semacam inilah yang sedang dibangun oleh kepala pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah.

Tulisan ini berusaha mengelaborasi praktek politik alienasi yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah birokrat. Namun sebelum sampai kesana, tulisan ini akan mengawali dengan pemahaman dasar alienasi yang kemudian menjadi kerangka dalam pembahasan masalah ini. Dalam pemahaman ini tentu alienasi akan melihat seberapa besar kebijakan ini merugikan birokrat yang menjadi korban. Berbicara korban maka pasti ada implikasi pula. Oleh karena itu, ada beberapa implikasi dari politik alienasi yang akan dijabarkan dalam tulisan ini. Tentu harapannya, akan ada pelajaran yang dapat diambil dari fenomena-fenomena ini.

Alienasi Sebagai Kerangka Teoritik

Alienasi menjadi kerangka pemikiran mendasar dalam tulisan ini, sebab keterasingan individu secara umum menjadi fokus utama sudut pandang teori alienasi ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam karya S.P Varma yang berjudul *Teori Politik Modern*, alienasi dijelaskan sebagai persoalan antara suatu masyarakat kapitalis yang sangat terorganisasi dan suatu negara yang tersentralisasi yang menindas individu atas

¹⁰² George Ritzer & Douglas J. Goodman. *Teori Marxis dan Berbagai Macam teori Neo-Marxian*. Jogjakarta; Kreasi Wacana. 2011. Hlm. 35

dasar keseragaman yang ketat. Penindasan ini diartikan sebagai pengasingan individu yang tidak berdaya. Suatu alienasi tidak hanya berasal dari kerja atau karyanya, seperti yang diungkapkan Marx dalam karyanya, tetapi juga dari masyarakat, dari negara, dari rekan sejawatnya, dan bahkan dari dirinya sendiri¹⁰³.

Organisasi politik sendiri telah menjadi sangat terpusat dan formal, bahkan bila seorang individu berhasil dengan mati-matian meningkatkan kariernya, ia tidaklah akan lebih dari sebutir roda penggerak mesin/mekanisme yang bersangkutan, dan ia takkan banyak bisa berharap untuk memengaruhi cara kerjanya. Walau demikian, semua pribadi yang ada pada tingkat-tingkat hirarki yang lebih rendah tampaknya terus saja merana. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok lama seperti keluarga atau masyarakat, yang dulunya bisa meluahkan waktunya untuk berekreasi telah pula mengalami disorganisasi secara cepat. Alienasi dan keterasingan individu dari luar telah membuat manusia tak beristirahat. Diluar masyarakat dan negaranya sendiri, ia menemukan negara-negara kuat dengan kekuatan merusak yang ganas¹⁰⁴.

Menurut Karl Marx, alienasi dalam bidang kerja mempunyai empat aspek, yaitu : pertama, manusia mengalami alienasi dari obyek yang diproduksinya. Kedua, manusia mengalami alienasi dari proses produksi. Ketiga, manusia mengalami alienasi atau teralienasi dari dirinya sendiri. Keempat, manusia teralienasi dari pergaulannya dengan teman-temannya atau masyarakat¹⁰⁵.

Merujuk pada kutipan diatas, maka alienasi menjadi ketakutan yang luar biasa terhadap individu. Hal ini tentu merupakan sebuah kategorisasi yang sangat tidak ingin diterima oleh manusia. Alienasi tentu sebagai sebuah pengasingan oleh penguasa yang merasa akan ada orang yang akan menghambat kepentingannya. Dapat dikatakan bahwa alienasi merupakan proses di mana manusia menjadi asing terhadap dunia tempat mereka hidup.

Alienasi merupakan satu contoh kontradiksi yang menjadi fokus pendekatan dialektis Marx. Ada kontradiksi nyata antara sifat dasar kita yang dibatasi dan ditransformasikan oleh kerja dengan kondisi-kondisi sosial yang aktual dari kerja dibawah kapitalisme. Marx ingin menekankan bahwa kontradiksi ini tidak

¹⁰³ S.P. Varma. *Teori Politik Modern*. Jakarta : Rajawali Pres.1999. Hlm. 421

¹⁰⁴ Ibid, hlm. 421 - 422

¹⁰⁵ Hotman Siahaan. *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga. 1986. Hlm. 29

bisa dipecahkan hanya didalam pikiran. Kita merasa kurang tahu atau bahkan tidak teralienasi sama sekali karena kita mengidentifikasi diri dengan majikan kita atau dengan segala sesuatu yang bisa kita peroleh dengan gaji kita. Justru keadaan seperti ini merupakan gejala alienasi kita, yang hanya bisa diobati dengan perubahan sosial¹⁰⁶.

Pemikiran Marx yang menjadikan pentingnya pergerakan oleh kaum-kaum yang teralienasi ini sangat penting. Bukan hanya menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang disimpan dalam pikiran, namun perlu dilakukan dengan serius. Terkadang, alienasi ini juga bisa terjadi pada orang yang menganggap dirinya teralienasi, begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya perubahan sosial dan ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat proses menuju perubahan sosial ini akan sulit terjadi dalam suatu tatanan masyarakat yang kompleks. Perlu pula adanya keberanian dalam menyelesaikan masalah baik pada diri sendiri atau orang lain. Sebab, alienasi juga erat kaitannya dengan kapitalisme yang mana setiap orang akan berlomba-lomba untuk mensejahterakan dirinya masing-masing hingga dapat pula melakukan cara untuk menyingkirkan orang lain.

Pengucilan Sebagai Strategi Penguasa

Pengucilan birokrat merupakan sebutan penulis untuk menerjemahkan kebijakan alienasi sebagai strategi penguasa dalam menyisihkan pendukung kompetitornya dalam kancah politik. Dalam hal ini, birokrat sebagai bagian dari masyarakat sipil tentu memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh aktor politik dan bagi yang menjalankannya, maka akan mendapatkan *reward* dan sebaliknya bagi yang menentang, maka akan mendapatkan *punishment*. Inilah wajah birokrasi saat ini dimana aktor-aktor didalamnya sudah tidak dapat lagi menerapkan profesionalisme dalam bekerja.

Sebagaimana mekanisme *reward* dan *punishment* yang berlaku senyatanya tentu apabila aparat birokrasi melanggar tata aturan yang telah ditetapkan. Namun, saat ini yang berlaku justru aturan tidak lagi diindahkan melainkan penguasa hanya

¹⁰⁶ *Op.cit.*,

memerhatikan “siapa mendukung saya dan apa kontribusinya”. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas jauh berada dibawah loyalitas.

Berbicara terkait loyalitas, strategi pengucilan ini menjadi salah satu *trending topics* dikalangan masyarakat lokal saat ini. Sebab, sangat nyata terjadi dukung mendukung antara birokrat dengan calon aktor yang akan menduduki jabatan politik. Hal ini menjadi lebih nyata yakni dengan keterlibatan kelompok birokrat secara nyata dalam memobilisasi massa hingga aktif dalam kegiatan kampanye yang sebetulnya sangat tegas diatur larangannya dalam undang-undang. Inti kebijakan alienasi ini berupa “pemusnahan” birokrat yang tidak mendukung penguasa yang terpilih dan tentunya birokrat ini akan dianggap akan menghambat apa yang akan dilakukan oleh sang penguasa.

Ada beberapa fenomena nyata dalam kebijakan alienasi ini, diantaranya yaitu pemindahan ke tempat yang cukup jauh sebagai contoh di daerah perbatasan, penurunan jabatan yang awalnya seorang kepala bagian kemudian menjadi staf yang tanpa tugas pokok dan fungsi yang jelas serta beberapa fenomena lainnya. Kejadian ini secara nyata dipertontonkan dengan gagahnya oleh sang penguasa yang tidak ingin ada pecundang didalam kepemimpinannya. Hal semacam ini menunjukkan bahwa jabatan politik hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan memusnahkan musuh-musuhnya bukan dengan menggunakan kekuasaan itu sebagai cara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Tabel 1: Nama Pejabat yang Menjadi Korban Pengucilan

Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan Sebelumnya	Jabatan Sekarang
M. Sandi Artha, S.Sos	IV/A	Kepala Bidang Kepustakaan (Baperpusda)	Staf pada BKKBN
H. Darwis, S.H.	IV/C	Asisten II (Administrasi Umum & Kesra)	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Mutawalli, S.H.	IV/B	Sekretaris Dinas Perhubungan	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
H. L. Idham Halid, M.Pd	IV/C	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Staf pada BKKBN
L. Wiratmaja, S.IP	IV/B	Staf Ahli Bidang Kesra	Staf pada BPMD

H. Suhardi, S.H., M.H	IV/B	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Staf pada BAPPEDA
Saifullah, S.Sos., M.Si	IV/A	Kepala Bidang PAD (Dispenda)	Staf pada BPMD
L. Sukri, S.Sos	IV/A	Camat Praya	Staf pada BAPPEDA

Sumber : *Wawancara dengan M. Sandi Artha, S.Sos (2012)*

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa ada beberapa pejabat dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dialienasi oleh Bupati. Pada dasarnya, data diatas masih segelintir kecil dari jumlah birokrat yang dialienasi. Namun, merujuk pada data diatas yang kesemua birokrat yang awalnya menjabat pada pos-pos strategis kemudian diposisikan sebagai staf yang juga tidak jelas tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati tidak menginginkan ada birokrat yang tidak mendukungnya duduk pada posisi strategis walaupun birokrat yang dikucilkan tersebut memiliki kapabilitas.

Memang, dari data diatas ada yang menjadi pendukung salah satu calon Bupati namun ada pula yang netral atau tidak mendukung siapapun. Justru sikap netral birokrat menjadi konsekwensi tersendiri karena dianggap sebagai pendukung *incumbent*¹⁰⁷. Oleh karena itu, pengucilan birokrat ini menjadi cara ampuh Bupati untuk menjalankan pemerintahan bersama dengan pendukungnya yang belum tentu semua dapat dikatakan berkompeten.

Melanggar Nilai-Nilai Demokrasi

Melihat realita yang telah dikemukakan sebelumnya, tentu sangat menciderai azas demokrasi yang seyogyanya dapat diterapkan kepada semua pihak bukan pada golongan tertentu saja. Hak setiap orang untuk bebas memilih, berpartisipasi pun telah dilanggar oleh para penguasa yang ingin agar kepentingan-kepentingannya terlaksana tanpa ada hambatan. Sehingga, implikasi besar terkait dengan fenomena-fenomena tersebut yakni dilanggarnya nilai-nilai demokrasi oleh penguasa akibat dari pengucilan yang dilakukannya. Seperti pengertian demokrasi komprehensif yang dikemukakan oleh David Held mendukung prinsip dasar otonomi yang kemudian Held menyebutnya

¹⁰⁷ *Incumbent* adalah penguasa yang akan habis masa jabatannya kemudian mencalonkan diri kembali dalam jabatan yang sama.

dengan otonomi demokrasi (*democratic autonomy*) yang membutuhkan pernyataan hak-hak manusia (*bill of rights*) diluar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan untuk menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik¹⁰⁸.

Demokrasi terbatas menjadi pilar yang tepat dalam menelaah implikasi ini. Demokrasi terbatas adalah sistem politik yang memiliki beberapa elemen demokrasi tetapi juga memiliki keterbatasan pada kompetisi, partisipasi dan kebebasannya¹⁰⁹. Nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi dan kebebasan menjadi sorotan utama yang perlu diperhatikan akibat dari pengucilan oleh penguasa ini. Seringkali, demokrasi ini ditandai dengan adanya kelompok elit yang anggotanya mempunyai hak untuk mengintervensi proses demokrasi dalam rangka melindungi kepentingan mereka¹¹⁰. Kelompok elit inilah yang mampu mengendalikan demokrasi sehingga mampu membuat suatu kondisi dimana pengucilan demokrat menjadi legal dalam konteks kepentingan mereka.

Merujuk pada konteks dilanggarnya nilai-nilai demokrasi oleh penguasa akibat dari pengucilan birokrat, adapun nilai-nilai birokrasi itu adalah kebebasan, kemerdekaan, persamaan hak, keterbukaan, kontrol, dan partisipasi¹¹¹. Namun, dalam pembahsan kali ini akan lebih difokuskan pada nilai krusial yang dilanggar, yakni kebebasan, persamaan hak dan partisipasi. Ketiga nilai ini menjadi penting sebab bukan hanya berimplikasi pada individu yang dilanggar haknya melainkan akan menurunkan partisipasi dalam berdemokrasi.

Beribicara terkait dengan nilai kebebasan, harus dilihat terlebih dahulu pengertian kebebasan. Pengertian secara harfiah orang yang bebas adalah orang yang dalam kehidupannya tidak ada beban, tekanan, kekangan dan ancaman oleh orang lain¹¹². Namun, kebebasan tentu tidak mutlak, melainkan ada batasan-batasan yang mengacu pada nilai atau kesepakatan masyarakat. Tentu kesepakatan masyarakat ini akan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, nilai-nilai kebebasan pada prinsipnya ada kesamaan yang secara esensial bersifat universal seperti

¹⁰⁸ Georg Sorensen. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1993. hlm. 14 - 15

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 83

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Bambang Istianto. *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2011. hlm. 130

¹¹² *Ibid.*,

misalnya, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan lainnya yang dilindungi oleh undang-undang¹¹³.

Mengacu pada definisi atau pengertian kebebasan diatas, kebebasan birokrat yang terkucilkan ini tentu telah dirampas oleh kelompok elit yang berkuasa. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah kebebasan berekspresi dan berserikat ini telah dibatasi oleh sang penguasa hanya untuk merealisasikan kepentingannya. Sehingga telah dilakukan pelanggaran nilai demokrasi dan pemangkasan kebebasan untuk memilih pemimpin.

Selanjutnya nilai yang menjadi sorotan kedua yakni persamaan hak. Persamaan menjadi suatu “nilai” dalam pergaulan masyarakat, karena pada hakekatnya dengan pengakuan terhadap kedudukan manusia adalah sama merupakan bentuk penghargaan yang tertinggi atas eksistensi “martabat kemanusiaan”, jadi persamaan adalah termasuk dalam nilai “kemanusiaan”¹¹⁴. Mengacu pada penjelasan persamaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada persamaan antara orang yang mendukung elit penguasa dengan yang tidak mendukung. Artinya, persamaan hak untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan tentu dengan kapabilitas dan kerangka aturan yang jelas telah dilanggar pula oleh kelompok elit yang berkuasa.

Terakhir, nilai demokrasi yang menjadi sorotan dalam tulisan ini yaitu partisipasi. Partisipasi secara umum diartikan sebagai keterlibatan banyak pihak atau keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela, sejak dari awal hingga akhir kegiatan¹¹⁵. Namun, penulis membatasi pada kata “sukarela” melainkan birokrat tentu bukan sukarela tetapi lebih pada kepentingan individu. Sehingga dalam hal partisipasi ini tentu birokrat yang dikucilkan akan meniadakan partisipasinya dalam kegiatan pemerintah. Bukan hanya birokrat yang dialienasi, implikasinya pun akan terjadi pada berkurangnya partisipasi masyarakat untuk berdemokrasi akibat dari fenomena ini. Oleh karena itu, implikasi dari pengucilan birokrat ini cukup besar sebab nilai-nilai demokrasi telah dilanggar apalagi Indonesia yang masih dalam proses menuju kedewasaan berdemokrasi.

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ *Ibid.*,

Dua Model Perlawanan Birokrat

Sebagaimana pemaparan implikasi politik alienasi diatas, maka para birokrat yang teralienasi tidak akan tinggal diam melihat hak-haknya ditindas oleh penguasa. Birokrasi tidak pernah beroperasi dalam “ruang hampa politik” dan bukan “aktor netral” dalam politik¹¹⁶. Hal inilah yang menjadi kajian menarik untuk dianalisa lebih mendalam karena terkait dengan fenomena birokrat yang bukan aktor netral dalam politik dan pemenuhan hak-hak birokrat tidak berbanding lurus dengan konstitusi yang melarang PNS untuk berpolitik. Upaya para birokrat ini pun cukup serius mengingat politik alienasi yang dilakukan oleh Bupati ini telah menciderai hak sipil birokrat. Oleh karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh birokrat yang menjadi korban politik alienasi ini, diantaranya adalah upaya hukum dan lobi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

❖ *Upaya Hukum*

Sebagai birokrat yang tentu menghormati hukum dan mengerti bahwa hukum bisa dikatakan cukup mampu untuk membantu mereka agar mendapatkan perlindungan atas politik alienasi ini. Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa birokrat yang berpendidikan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur hukum untuk mengajukan gugatan terhadap putusan Bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini dipahami dengan baik. Upaya hukum ini pada dasarnya telah disusun oleh kelompok birokrat yang menjadi korban politik alienasi ini dengan berbagai bukti hukum yang menguatkan. Tahapan yang dilalui pun dapat dikatakan cukup panjang, sebab perlu adanya kesepakatan secara bersama-sama untuk menentukan apakah mereka akan mengajukan gugatan atau tidak.

Perundingan terus berlanjut diantara mereka, namun setelah gugatan itu disusun secara rapi dan sistematis tiba-tiba saja ada angin segar yang menyatakan bahwa mereka akan didudukkan kembali pada pos-pos awal yang mereka tempati. Bersamaan dengan hal tersebut, gugatan ini pun ditunda terlebih dahulu karena ada berita baik menurut mereka. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2011 berita tersebut tidak juga terealisasikan. Gugatan yang telah dipersiapkan tersebut pun kembali dipersiapkan dan untuk kedua kalinya berita baik pun terdengar lagi.

¹¹⁶ Mohtar Mas'ood. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1994. Hlm. 67

Inilah yang menurut penulis merupakan kesalahan birokrat ini yang tidak secara konsisten memperjuangkan pelanggaran aturan dan demokrasi yang telah dilakukan oleh Bupati. Oleh karena itu, perlu keseriusan dan konsistensi dalam upaya hukum yang akan dilakukan oleh birokrat ini.

❖ ***Melakukan lobi ke DPRD***

Upaya birokrat yang dialienasi oleh Bupati ini tidak cukup sampai melakukan upaya hukum yang tertunda, melainkan ada upaya lain yang dilakukan yakni melakukan lobi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dilakukan mengingat DPRD sebagai lembaga penyalur aspirasi yang harapannya mampu memperjuangkan atau mengingatkan Bupati akan kesalahannya. Tentu lobi ke DPRD ini diharapkan mampu mengembalikan posisi birokrat yang teralienasi ini kembali.

Realisasi harapan ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan, sehingga perlu proses agar hal ini dapat diwujudkan. Namun, yang perlu diingat adalah partai dominan di DPRD juga partai Bupati sehingga akan lebih sulit lagi jika melakukan proses ini. Mengingat akan proses politik yang begitu rumit, maka sudah mulai tidak relevan lagi jika upaya ini dilanjutkan.

Menarik Pelajaran

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang diatas, maka pada bagian ini akan menyimpulkan bahasan-bahasan terkait dengan topik utama yakni politik alienasi birokrat. Pada dasarnya, tidak ada yang patut untuk dibenarkan dalam konteks kebijakan politik alienasi ini sebab tidak mungkin ada akibat tanpa adanya sebab. Tentu hal yang menjadi pemicu utama terjadinya politik alienasi ini adalah birokrat yang ikut terlibat baik secara uslangsung ataupun tidak langsung dalam pertarungan politik. Sehingga implikasinya pada resiko jika calon kepala daerah yang didukung harus kalah.

Banyak hal yang dapat diambil dari implikasi kebijakan politik alienasi ini, sebab dalam berdemokrasi sangat menghormati hak-hak sipil setiap elemen masyarakat. Hal yang menarik yaitu adanya upaya untuk membinasakan kelompok yang dianggap tidak mendukung kepentingan penguasa, namun ini menjadi suatu ketertarikan tersendiri sebab hal ini tentu menjadi sebuah kewajaran tetapi tidak sampai bermain

diluar kerangka aturan. Kemudian, melihat upaya penyelamatan diri oleh birokrat yang teralienasi tadi, tentu harus ada konsistensi dari mereka sendiri untuk menuntut haknya. Namun, sisi oportunistik mereka muncul kembali ketika dihembuskan berita bahwa mereka akan dikembalikan lagi pada posisi semula. Tentu saja ini menunjukkan bahwa semua elemen pemerintahan sudah “bobrok” dan tidak ada lagi yang dapat dipercaya. Sehingga masyarakat tidak patut mencontoh perilaku semacam ini melainkan harus bersikap konsisten dalam setiap keputusan yang akan diambil.

Terakhir, sebagai penutup yakni perlu adanya penegakan aturan yang maksimal dari setiap elemen. Tentu yang diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi secara komprehensif yaitu masyarakat. Sehingga perlu peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjauhkan birokrasi dari kebijakan politik alienasi yang tidak baik semacam ini.***

Daftar Pustaka

- Siahaan, Hotman. 1986. *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Varma, S.P.. 1999. *Teori Politik Modern*. Jakarta : Rajawali Pers
- Mas'oed, Mohtar. 1994. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Istianto, Bambang. 2011. *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J.. 2011. *Teori Marxis dan Berbagai Macam teori Neo-Marxian*. Jogjakarta : Kreasi Wacana.